**KINERJA LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BHAYANGKARA
INDONESIA (LRPPN-BI) DALAM PROGRAM
THERAPEUTIC COMMUNITY
DI KOTA MEDAN**

Juliana Malinda Lubis¹, Dara Aisyah²
Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: ¹julianamalinda69@gmail.com

***Abstract:** Drug abuse in Indonesia is increasing from year to year, causing very detrimental consequences for individuals or society, especially the younger generation. can result in greater danger to the life and cultural values of the nation which in the end will be able to weaken national security. Drug abuse is currently the main topic of discussion in Indonesia. Where the government has a policy to form an institution that can prevent or overcome drug abuse. Guidance to restore and develop positive behavior in rehabilitation patients. The purpose of this research is to find out the role of the Indonesian Bhayangkara Narcotics Abuse Prevention Rehabilitation Institute (LRPPN-BI) for drug addicts. It is hoped that this research can add to knowledge in discussing the role of rehabilitation institutions in dealing with drug abuse problems and can provide positive input for the government of Medan City in making decisions related to drug abuse. The research method used in this study is descriptive qualitative which explains the phenomenon in depth through data collection. This study uses the theory presented by Agus Dwiyanto with performance indicators which include policy measures and objectives, productivity, service quality, responsiveness, accountability, accountability.*

***Keywords:** drug addict; rehabilitation; LRPPN-BI*

Abstrak: Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahun, menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. dapat mengakibatkan bahaya yang lebth besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. penyalahgunaan narkoba yang sedang menjadi topik pembahasan utama di Indonesia. Dimana pemerintah memiliki kebijakan untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat mencegah atau menaggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut. Bimbingan memulihkan dan mengembangkan tingkah laku positif pada pasien rehabilitasi. Tujuan dalam pelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan mengenai Peranan lembaga rehabilitasi dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba dan dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Kota Medan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teori yang disampaikan oleh Agus Dwiyanto dengan indikator kinerja yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas.

Kata kunci: pecandu narkoba; rehabilitasi; LRPPN-BI

PENDAHULUAN

Pemasalahan mengenai kasus narkoba menjadi sorotan yang penting dalam negeri ini. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif jaringan sindikatnya, maka dapat berdampak terhadap kelangsungan hidup dan masa depan. Bukan hanya kepada penyalahgunanya saja, namun juga kepada masa depan bangsa dan negara.

Di Indonesia, permasalahan penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun kian meningkat, terbukti dengan semakin banyaknya pemberitaan-pemberitaan melalui media. Baik itu di media massa maupun di media elektronik, yang hampir setiap hari memberikan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan (Simangunsong, 2015).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 80% orang. Terus meningkatnya kasus narkoba di Indonesia terus meningkat pada 3 tahun terakhir mulai tahun 2018 sebesar 1.505 juta orang, dan ditahun 2019 menurun sebesar 1 juta dan ditahun 2020 juga mulai menurun menjadi 833 juta orang. akan tetapi belum terimbangi dengan pelayanan rehabilitasi yang memadai. Perkembangan atau pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia yang begitu cepat disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi sehingga upaya mencegah masuknya barang berbahaya itu menjadi tantangan terberat bagi aparat penegak hukum juga.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap 80 persen peredaran narkoba internasional yang masuk ke Indonesia melewati jalur laut. Hal ini terjadi karena wilayah Indonesia memiliki perairan yang luas. Sehingga jalur laut masih menjadi favorit para sindikat jaringan internasional untuk menyeludupkan narkoba ke Indonesia. Hal tersebut

dikatakan Brigjen Pol I Wayan Sugiri selaku Direktur Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN: "80 persen memasuki wilayah Indonesia melalui jalur laut. Kita tangkap itu ada titik merah, yang paling banyak itu dari pulau Sumatera dari Aceh ke bawah hingga ke Tanjung Balai, Asahan, kemudian lanjut ke pulau Kalimantan Utara juga. Terkait hal yang sama terjadi pada tahun 2019, pemakai narkoba di Sumatera Utara (SUMUT) berada pada angka 7.00 persen atau setara dengan jumlah penduduk sekitar 1.707.936 jiwa. Sementara itu pemakaian narkoba di Sumut dalam memasuki tahun 2020 dari angka pemakai narkoba, menjadi 8 persen, dengan kata lain, jumlah penduduk Sumut yang menggunakan narkoba, masih banyak yaitu mencapai 269 juta jiwa. Berdasarkan data yang tercatat padatahun 2020 maka peningkatan angka pemakai Narkoba semakin bertambah tiap tahunnya, kasus narkoba dikutip dari laman website BNN Hal ini tentunya perlu diberikan edukasi.

Tim narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap dua kurir di Kecamatan Medan Selayang, Medan. Kedua kurir yang ditangkap bersama barang bukti sabu seberat dua kilogram sudah ditahan di Mapolda Sumut. Atas perbuatannya, kedua pria itu terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Hal tersebut dikatakan Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut Kombes: "Saat diinterogasi kedua pria yang diamankan itu mengaku berangkat dari Aceh untuk mengantarkan barang bukti dua kilogram sabu ke daerah Jambi.

Terjadinya hal-hal tersebut haruslah dikurangi untuk menjaga kesejahteraan penduduk yang ada, maka pemerintah dituntut untuk menanggulangi masalah narkoba, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk penanggulangan

penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk program rehabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Pemerintah telah melaksanakan beberapa tahapan program rehabilitasi seperti, rehabilitasi medis (detoksifikasi), yaitu tahap pertama yang perlu dijalani oleh pecandu agar terlepas dari ketergantungan narkotika.

Pada tahap ini, dokter akan memeriksa kesehatan pecandu, baik kesehatan fisik maupun mentalnya. Selanjutnya tahap rehabilitasi nonmedis yaitu pecandu narkotika akan mengikuti berbagai macam kegiatan pemulihan secara terpadu, mulai dari konseling, terapi kelompok, hingga pembinaan spiritual atau keagamaan. Adapun tahapan program rehabilitasi diakhiri dengan tahap bina lanjut (aftercare), yaitu tahap akhir dari rangkaian rehabilitasi narkotika.

Para pecandu narkotika akan diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Hal ini bertujuan agar mereka bisa kembali bekerja dan tetap produktif setelah menyelesaikan program rehabilitasi.

Pihak Lembaga Masyarakat dengan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyiaran Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN BI) mendukung program tersebut, melaksanakan program rehabilitasi kepada para korban narkotika, Dimana pemerintah memiliki kebijakan untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat mencegah atau menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut.

Pada dasarnya Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyiaran Narkotika (LRPPN) Bhayangkara Indonesia bertugas

melakukan sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat dan instansi yang terkait. Pihak LRPPN sudah membangun Panti Rehabilitasi di beberapa daerah di Sumatera Utara, diantaranya di kota Medan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Sergei, dan daerah lainnya yang masih dalam proses pembangunan.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat kurangnya pengamanan yang ketat terhadap pasien rehabilitasi di LRPPN, hal ini menyebabkan kurangnya kinerja rehabilitasi terhadap pasien anak usia muda dalam penggunaan narkotika dan selain kurangnya pengamanan yg mengakibatkan pasien rehabilitasi kabur ada faktor lain juga yaitu mahal biaya untuk rehabilitasi di LRPPN.

Hal tersebut dikatakan Suwito selaku Pimpinan LRPPN RI: "Sebagian yang kabur kemarin masih baru, masih berontak mau bebas. Untuk yang merencanakan pelarian itu tetap kita bina.

Terkait hal yang sama juga terdapat puluhan pasien yang kabur pada saat jam makan pagi. Para pasien itu dikabarkan tiba-tiba saja mengamuk dan membanting piring yang berada di dalam dapur makan.

Hal tersebut dikatakan salahsatu warga yang enggan disebut namanya. "Udah ribut-ribut gitu, nggak lama kami lihat mereka dobrak pagar depan dan kabur semuanya.

Berdasarkan observasi yang peneliti lihat dan juga wawancara pasien peneliti melihat adanya kurangnya jam tidur pada pasien, sehingga pasien sering kelelahan karena banyaknya kegiatan LRPPN-BI yang harus dilakukannya proses berjalannya program rehabilitasi.

Hal tersebut diperlukan kinerja LRPPN sebagai upaya untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap korban narkoba, bahwa mereka bukanlah sampah masyarakat, tetapi mereka juga manusia yang masih punya harapan dan masa depan dan juga merubah pandangan masyarakat selama ini, bahwa rehabilitasi bukan merupakan suatu penjara yang menakutkan, tetapi di LRPPN ini digam-

barkan bahwa rehabilitasi merupakan suatu wadah yang menyenangkan yang dapat membantu penyalahgunaan narkoba lepas dari kecanduannya terhadap narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat.

METODE

Tipe dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pencegahan masalah yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti (seseorang, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya (Siagian 2011). atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.”

Penelitian ini dilakukan di Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena LRPPN Bhayangkara Indonesia merupakan salah satu panti rehabilitasi yang menjalankan program rehabilitasi terhadap anak usia muda hingga umur yang tidak dapat ditentukan. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum dalam penelitian ini diperlukan untuk memperjelas tempat penelitian. Berikut ini deskripsi mengenai gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Rehabilitasi LRPPN-BI adalah nama suatu lembaga rehabilitasi Indonesia yang menjalankan program rehabilitasi yang memiliki dua tahap Rawat Jalan dan Rawat Inap serta program Rehabilitasi Medis dan Sosial berbasis masyarakat di kota Medan. Kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan. Sementara sebagai landasan

manajemen didasari kepada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1997 tentang Status Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan Surat Keputusan Walikota Medan No.188.342-/SK/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No.5 Tahun 1997 Jo. Surat Keputusan Walikota Medan No.14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Lembaga Rehabilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia disingkat dengan LRPPN-BI, yang didirikan pada tanggal 13 Agustus 2015. Berdasarkan Nomor 20 tanggal 13 Agustus 2015 tentang pendirian LRPPN Bhayangkara Indonesia, dibawah binaan dan bimbingan Kabag luhkum Divkum Mabes Polri Kombes Pol.Drs.H.Jhon Hendri SH MH.

Latar belakang berdirinya LRPPN Bhayangkara Indonesia karena keinginan sebagai bagian dalam komponen masyarakat mempunyai suatu kewajiban dan bentuk nyata kegiatan untuk membantu pemerintah dan instansi yang terkait dengan narkoba dalam hal ini Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia untuk ikut berperan aktif dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dalam (P4GN).

LRPPN Bhayangkara Indonesia mempunyai tugas dan fungsi dalam sosialisasi pencegahan masalah narkotika serta permasalahan rehabilitasi narkotika bagi pengguna dan pecandu. Dalam hal ini LRPPN Bhayangkara Indonesia membentuk dan membangun panti rehabilitasi ketergantungan narkotika di Sumatera Utara ada dikota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Utara Aekkanopan, dan juga panti rehabilitasi yang berada di kota Medan yang diberi nama Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia.

1. Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia untuk Membantu para Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna narkoba untuk pulih

dari Ketergantungan Narkoba.

2. Visi Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia adalah “Menjadi Lembaga Masyarakat yang Profesional dan Mampu melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba)”. Untuk dapat memujudkan visi Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia tersebut maka perlu dirumuskan misi yang menggambarkan target atau amanah yang harus dituntaskan agar tujuan lembaga dapat terlaksana dan tercapai sesuai visi yang telah ditetapkan .

Misi Balai Besar Pusat Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia antara lain:

1. Kebijakan nasional dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan narkoba.
2. Melakukan pencegahan dan Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba).
3. Mendukung pelaksanaan kebijakan Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
4. Membangun Pusat Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba.

Fasilitas

1. Kamar VIP dan regular.
2. Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia memiliki 41 jumlah kamar. Ada dua jenis kamar yang terdapat dalam Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia yaitu, jenis kamar VIP dan regular.
3. Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia memiliki kamar VIP dengan jumlah 10 kamar, yang memiliki fasilitas : AC, LEMARI ES, TV, dan tempat tidur SPRING BED.
4. Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia juga memiliki kamar regular dengan jumlah 31 ruangan

dan bangsal dengan kapasitas.

5. Untuk menunjang kegiatan serta pengembangan bakat yang dimiliki residen maka Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia menyediakan sarana olahraga didalamnya (Kolam Renang, lapangan Futsal, Badminton ,Tenis Meja, Sen-am Aerobik)
6. Realigi (Mushollah ,Ruang Ibadah Nasrani ,Ruang Ibadah Budha)
7. Guest House (Bagi para keluarga, saudara, ataupun teman dari para residen yang bertempat tinggal jauh, Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia menyediakan tempat inap dengan fasilitas yang lengkap seperti, AC, TV, Lemari ES, Tempat tidur yang nyaman, CCTV dll.
8. Klinik Pratama LRPPN BI (Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia memiliki klinik yang berfungsi sebagai balai pengobatan bagi residen dan terbuka untuk umum)
9. Laundry (Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia menyediakan laundry kepada seluruh residen)
10. Catering (Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia menyediakan catering, guna memenuhi makanan dan minuman para residen)

Layanan

1. Rawat inap
Program ini di desain berdasarkan kebutuhan residen, Residen yang menjalani berbagai macam kegiatan terapi, seperti konseling individu, konseling kelompok, edukasi, aktivitas rohani dan kegiatan terapi lainnya. Program ini menggunakan pendekatan yang mengiteraksikan model pembelajaran sosial dengan pendekatan motifasional dan terapi kognitif-perilaku. Penerima manfaat yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi dan telah memiliki usaha, akan diajukan untuk mendapat bantuan usaha ekonomi produktif.
2. Rawat jalan
Program ini juga dapat menjadi

program lanjutan dari program rawat inap intensif. Program ini di desain dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan premier. Program dilakukan melalui beragam program detoksifikasi, terapi medis, holestik, tusuk jari dan obat herbal, sesi individu (Konseling), kelompok hingga bersama pasangan atau keluarga, kelompok bantu diri, kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya. Program yang didesain khususnya untuk masalah gangguan zat yang masih dalam taraf menengah atau belum mengalami kebutuhan (adiksi).

3. Test urine
Untuk mengetahui sejumlah zat narkotika dalam tubuh dan salah satu hasil dari sisa metabolisme yang harus dibuang dari tubuh.
4. Pelayanan medice
Memberikan pelayanan dan Melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi atau penyakit yang di derita residen dan layanan akupuntur.
5. Pelayanan Konseling
Memberikan bantuan kepada residen berupa bimbingan agar mampu mengembangkan potensi yang di miliki residen.
6. Pelayanan Psikologi
Memberikan terapi psikologis dengan menggunakan metode tertentu dan beragam sesuai kebutuhan termasuk penggunaan hipnoterapy.
7. Tes Minat dan Bakat
Bertujuan untuk mengetahui kecendrungan residen dalam hal minat dan bakatnya, agar individu mengetahui potensi yang dimiliki sehingga memudahkan individu dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan minat dan bakatnya.

Didalam pelayanan sosial maka dibutuhkan juga sistem organisasi, tujuannya untuk mengatur sistem manajemen yang ada di Balai Besar Pusat

Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia. Struktur organisasi ini harus diatur dengan manajemen yang baik. Pemerintah memiliki kebijakan untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat mencegah atau menaggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu Lembaga Rehabilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) adalah salah satu tempat Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika. Membantu pemerintah dan instansi yang terkait dengan narkotika dan mempunyai tugas dan fungsi dalam sosialisasi pencegahan masalah narkotika serta permasalahan rehabilitasi narkotika bagi pengguna dan pecandu.

Kebijakan Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika tersebut adalah merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkotika di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tujuan untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan narkoba dari pada penjatuhannya pidana penjara atau pidana kurungan. Penjatuhannya rehabilitasi ini sesuai dengan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai tahanan kasus narkoba sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dijatuhkan dan kondisi LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak mendukung dikhawatirkan malah mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalah guna narkoba tersebut. Penjatuhannya rehabilitasi masih jarang dijatuhkan kepada para korban penyalah guna narkoba padahal

telah diatur secara tegas dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Kebijakan Program Rehabilitasi Narkotika di LRPPN adalah sbb :

Rehabilitasi LRPPN Bahayangkara Indonesia memiliki program 3 (tiga) tahapan rehabilitasi, yaitu 3 (tiga) bulan pertama, 3 (tiga) bulan kedua, dan 3 (tiga) bulan terakhir.

Tahapan – tahapan program panti rehabilitasi LRPPN-BI

Prosedur Penerimaan :

- 1 Calon residen diantar langsung oleh orangtua/wali.
- 2 Rujukan dari POLDA, POLRES/TA, POLSEK, BNNP/BNNK, Dinas Sosial, Provinsi/Kab/Kota.
- 3 Rujukan dari Pengadilan yang memutuskan untuk mengikuti Program rehabilitasi sosial.
- 4 Rujukan IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapror) berdasarkan hasil assesmen yang bersangkutan harus direhabilitasi sosial. Syarat Penerimaan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Laki-laki berumur 14-50 tahun. Menyerahkan fotocopy KK yang masih berlaku (2rangkap).
- 5 Menyerahkan fotocopy KTP Istri (bagi yang sudah menikah) (2rangkap).
- 6 Menyerahkan fotocopy KTP Orang Tua (2rangkap).
- 7 Menyerahkan fotocopy Ijazah prndidikan terakhir (2rangkap).
- 8 Menyerahkan fotocopy akte kelahiran (2rangkap).
- 9 Menyerahkan surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa tempat bersangkutan tinggal (2rangkap).

Kebijakan BNN terhadap Rehabilitasi narkoba : Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, pengkajian, pengembangan dan uji coba metode

rehabilitasi sosial dan penunjang rehabilitasi sosial; pelayanan rehabilitasi sosial dan penunjang rehabilitasi sosial; pusat rujukan rehabilitasi sosial (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

penyusunan pedoman, pengkajian, pengembangan dan uji coba metode rehabilitasi sosial dan penunjang rehabilitasi sosial; pelayanan rehabilitasi sosial dan penunjang rehabilitasi sosial; dan pusat rujukan rehabilitasi sosial (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Balai Besar Rehabilitasi BNN melakukan siaga 24 (dua puluh empat) jam di bidang pelayanan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. www.djpp.kemendikham.go.id 9 2013, No.705 . Dalam rangka menindaklanjuti siaga 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Balai Besar Rehabilitasi BNN mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pelayanan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pelaksanaan tindak awal mengalami kendala berkaitan dengan kriteria penerimaan pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, Balai Besar Rehabilitasi BNN melaksanakan koordinasi dengan Direktorat di lingkungan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota). Dalam hal pelaksanaan penanganan pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, hasil putusan pengadilan akan diatur dalam Peraturan Kepala BNN.

Kebijakan Peraturan Menteri Sosial terhadap Rehabilitasi :

Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial merupakan amanat dari Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Dalam Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.

SIMPULAN

Pasal 3 Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjutan. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah, sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ditetapkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada 15 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306 agar setiap orang mengetahuinya.

Hubungan antara kebijakan publik dan kebijakan program rehabilitasi : Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum.

Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik (public goods) maupun jasa publik (public service). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, Muladi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
 Iskandar, D. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo\ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, implementasi, evaluasi* Jakarta: Elex Media Komputindo.
 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
 Soeparman, H. (2000). *Narkotika Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti.-Sujatno, A. (2008). *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Mandiri*. Jakarta.<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5645>
 Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*,(Jakarta :Ghalia Indonesia, 2005).

Dokumentasi Negara:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. [view/1766](http://www.presiden.go.id/view/1766)